

**SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI DESA JULUBORI KEC.
PALLANGGA MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam

Pada Fakultas Syari'ah UIN Alauddin

MAKASSAR

Oleh :

MUH. ASHAR ARMAN

Nim : 10200108026

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) ALAUDDIN

MAKASSAR

2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI DESA JULUBORI KEC. PALLANGGA MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa benar adalah hasil karya penyusun sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat dengan bantuan orang lain, secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Januari 2013

Penyusun

Muh. Ashar Arman

Nim. 10200108026



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi ini sodara **Muh. Ashar Arman**, NIM: 10200108026, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI DESA JULUBORI KEC. PALLANGGA MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa) memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan di sidang *Munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 29 Januari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag

Nip. 19720719 200003 2 002

Rahmawati Muin, S.Ag, M.Ag

Nip. 19760701 200212 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI DESA JULUBORI KEC. PALLANGGA MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa) yang disusun oleh saudara Muh. Ashar Arman, Nim, 10200108026, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Februari 2013 M bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1434 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei), tanpa (dengan beberapa) perbaikan.

14 Februari 2013 2013 M.
Makassar, -----
3 Rabiul Akhir 1434 H

DAFTAR PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muslim Kara, M. Ag	(.....)
Munaqisy I	: Drs. Thamrin Logowali, M. H	(.....)
Munaqisy II	: Drs. M. Thahir Maloko, M. Hi p(.....)	
Pembimbing I	: Drs. Urbanus Uma Leu, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Rahmawati Muin, S. Ag, M. Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Ali Parman, M.A
Nip. 19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, pencipta semesta beserta isinya, yang mengatur, memelihara dan memenuhi segala apa yang dibutuhkan setiap makhluk-Nya sehingga karya tulis (skripsi) ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat diselesaikan meskipun dalam kesederhanaan.

Shalawat dan salam-Nya semoga tercurah kepada pembawa risalah suci, pencerah dan penyelamat umat di hari tiada pertolongan kecuali dengan syafaatnya. *Amin*.

Dalam penyusunan ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, akan tetapi atas berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga semuanya dapat teratasi :

1. Sembah sujud ananda sebagai penghormatan dan terimakasih ananda yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Ayahanda **H. ABD. Muin Nganro** dan Ibunda **Hj. Nurhayati**, yang dengan penuh kasih sayang dan iringan doanya serta didikan untuk anak-anaknya. Juga untuk adik-adik tercinta dan segenap keluarga. Bagi penulis, Anda semua adalah lebih dari Inspirasi dan Motivasi.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Ali Parman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag., selaku ketua jurusan
5. Ibu Rahmawati Muin, S.Ag. M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi.
6. Bapak Drs. Urbanus Uma Leu. M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan untuk penulis dalam perampungan skripsi ini.

7. Ibu Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kakanda Senior Uccank, Iphul, Awie, terima kasih motivasi dan pengalaman yang telah di berikan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat yang telah membantu meluangkan waktunya guna untuk penyelesaian skripsi, Wahid, Mukhtar(CR) Qipoy, Akmal, Herdy, Riyan, Ahmad, Wawan, Hasbi, Andi Ambo Tou (AAT), Furqan, sekali lagi terima kasih.
10. Sahabat-sahabat “yang terlukis jelas dalam ingatan penulis ” di Ekonomi Islam Nur Huda Rasidin Tula, Mukhtar, Andi Ambo Tuo Matuliang, Muh. Zulfikar, Adi Putra Patata, Nur Alim Bahri, Abang Gun, Cua’, Akmal, Mufidah, Mimi, Sriwahyuni, Midawiyah, dan semua anak EKIS 08 tanpa terkcuali.
11. Seluruh Mahasiswa fakultas Syariah, khususnya Jurusan Ekonomi Islam yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan dukungan moril ataupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebersamaan kita merupakan isyarat pertemuan kita di Surga nanti. *Amin.*

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan maslahat bagi semua pihak, terutama untuk penulis sendiri.

Wassalam

Makassar, 29 Januari 2013

Penulis

MUH. ASHAR ARMAN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Hipotesis	7
D. Definisi Oprasional.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Bentuk Penggarapan sawah Dengan Sistem Bagi hasil di Desa Julubori.....	11
B. Agama Dan Kepercayaan Masyarakat Desa Julubori	20
C. Hak dan Kewajiban Pemilik sawah dan Penggarap Menurut Adat dan Hukum Islam.....	24
D. Penghasilan Utama Masyarakat Desa Julubori	29
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Instrumen Penelitian.....	35
D. Prosedur Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Julubori	39
B. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Julubori	42

C. Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Petani Penggarap Sawah di Desa Julubori.....	43
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Desa Julubori ..	30
--	----

Tabel 2	: Jumlah Potensi Yang di Kembangkan di Desa Julubori	31
Tabel 3	: Luas Tanah di Desa Julubori.....	41



ABSTRAK

Nama : Muh. Ashar Arman

NIM : 10200108026

**Judul : SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI DESA
JULUBORI KEC. PALLANGGA MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)

Skripsi ini membahas tentang penggarapan sawah dengan system bagi hasil menurut hukum Adat di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang di tinjau menurut hukum Islam. Dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Adapun beberapa sub masalah seperti bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil sawah di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penggarapan tanah dengan perjanjian bagi hasil di Desa Julubori.

Untuk memecahkan masalah tersebut, maka di gunakan metode yang relevan dengan penulisan , yaitu dengan metode kuantitatif dan pendekatan sosiologis, Syar'i, dan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan library research dan field research (observasi dan interview), Populasi (Desa Julu Bori, Kec. Pallangga Kab. Gowa) dan Sampel (Para petani Desa Julu Bori, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, metode pengolahan induktif dan deduktif.

Berdasarkan penelitian penulis, diketahui pemilik tanah mendapatkan satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian dengan syarat bahwa penggarap menanggung bibit, obat-obatan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan tersebut. Dengan demikian bagi hasil persawahan sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa Julubori adalah dibolehkan oleh syara' karena telah dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah Muzara'ah serta telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat-sahabatnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagian besar penduduk Islam Indonesia hidup bercocok tanam, akan tetapi tidak semua petani kebun dapat digolongkan sebagai pemilik lahan, karena itu dibedakan dalam tiga golongan yaitu. : Petani sebagai pemilik tanah, petani kebun sebagai penggarap dan petani kebun sebagai buruh. Demikian pula Sulawesi Selatan yang penduduknya hidup bercocok tanam pada umumnya, namun demikian masyarakat Desa Julubori pada khususnya ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya., demikian pula ada petani sebagai penggarap karena tidak mempunyai lahan perkebunan untuk digarapnya sendiri.

Sistem bagi hasil penggarapan sawah terjadi di Kecamatan Pallangga sudah merupakan tradisi sejak dahulu kala dan merupakan adat kebiasaan yang turun temurun hingga sekarang.

Masyarakat Kecamatan Pallangga pada umumnya adalah petani, sebagian besar merupakan petani penggarap, hal ini disebabkan karena jumlah penggarap bagi hasil dari tahun ke tahun semakin banyak, sedangkan lahan pertanian semakin sempit akibat dari jumlah penduduk dan pemukiman yang terus bertambah.

Dilihat dari perjanjian bagi hasil dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. Dampak Positif

Kehidupan masyarakat khususnya petani penggarap dan pemilik tanah adalah saling membantu, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling mengisi. Hal tersebut dilihat dari konsep pembagian hasil yaitu memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang di dapat oleh pemilik tanah dan petani penggarap. Misalnya pembagian hasil yang telah ditentukan bahwa, apabila biaya yang ditanggung oleh pemilik tanah, maka bagian pemilik sawah mendapat dua (2) bagian sementara penggarap mendapat satu (1). Jika penggarap menanggung biaya maka bagiannya mendapat 2 atau 3 sementara pemilik tanah mendapat 1 atau 2 bagian. Demikian juga apabila biaya ditanggung bersama maka bagian yang didapat antara pemilik tanah dan penggarap masing-masing ($\frac{1}{2}$).

2. Dampak Negatif

Dampak negatif yang timbul disebabkan adanya, pembagian hasil sebelum panen. Pembagian tersebut dilakukan hanya berdasarkan pembagian wilayah garapan melalui taksiran saja sehingga terkadang menimbulkan masalah antara satu dengan yang lainnya. Yang kemudian di mana masalah yang tidak dikehendaki antara keduanya, antara lain dapat menimbulkan pemutusan kerja terhadap orang yang dijanjinya. Masyarakat terkadang larut dengan adat yang sudah berlaku secara turun temurun mereka tidak menyadari bahwa apakah adat itu sudah sesuai perjanjian dalam syariat Islam.

Dengan adanya hal tersebut di atas timbullah usaha untuk menghilangkan ketimpangan dalam rangka memperoleh penghasilan yang bersumber dari tanah perkebunan itu yakni dengan diadakannya perjanjian bagi hasil tanah atas perkebunan yang digarap oleh petani kebun sebagai penggarap di Desa Julobori.

Pada mulanya pertanian bagi hasil adalah bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian. Objek perjanjian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam padi dan tenaga kerja petani.¹

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah.

a) *Muza>ra'ah*

Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.

b) *Mukha>barah*

Mukhabarah ialah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.²

c) *Musa>qat*

Bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

¹ Hardikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 140

² Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-1, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 117

Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kerjasama dalam bentuk *musa>qat* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.³

Dalam pengelolaan dengan sistem ini, tuan tanah menerima bagian tertentu yang telah diterapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk produksi dalam berbentuk-hasil bumi.

Muzara'ah menurut Imam syafi'i ialah kerja sama antara pemilik dengan penggarap untuk menggarapnya dengan imbalan sebagian dari hasilnya.⁴

Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah, terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam pengelolaan tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama sama seperti ini sebagai upaya atau bukti saling tolong menolong antara dua belah pihak.

³Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Bogor:Kencana, 2003), h. 243

⁴ Abullah Ai-Jaziry, *Kitab al-Fashu al-kazahibil a1-Arbaah*, Jilid IV, (Mesir Dirul Fikr, 1969), h. 236

Adapun Yang menjadi latar belakang pengarapan tanah dengan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah mempunyai lahan yang luas, akan tetapi tidak memiliki keahlian atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan atau mengelola lahannya itu.
2. Pemilik tanah berkeinginan untuk mendapatkan hasil tanpa bersusah paya, dengan jalan memberikan lahannya kepada orang lain untuk digarap atau dikelolanya dan hasilnya akan dibagi.
3. Penggarap tanah tidak mempunyai tanah garapan untuk dikelolanya atau belum punya pekerjaan yang tetap untuk dapat menghidupi diri dan keluarganya.
4. Penggarap tanah perkebunan kelebihan waktu untuk bekerja sebab tanah miliknya terbatas luasnya atau tanah sendiri tak cukup untuk dapat menghidupi dirinya serta anak isterinya.
5. Penggarap tanah perkebunan mempunyai hasrat atau keinginan untuk mendapatkan hasil dalam memenuhi kebutuhan keluarganya .

Dalam pelaksanaan pengelolaan tanah perkebunan dengan sistem bagi hasil prakteknya sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan diikuti oleh para sahabat, tanpa seorangpun dari mereka yang melarangnya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خير
يشصر ما يخرج منها من ثمر او زرع، فكان يعطي ازواجه مائة وسق، ثمانين وسق
تمر وعشرين وسق شعير

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra: Nabi SAW mendatangi perjanjian dengan penduduk kaibor untuk memanfaatkan tanah dengan itu yang berupa sayuran dari buah-buahan, akan menjadi bagian mereka. Nabi SAW memberi isteri-isterinya masing-masing 100 wasq, yaitu 80 wasq kurma dan 20 wasq gandum (Bukhari).⁵

Dari hadits tersebut diatas dapat dipahami bahwa penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil dibolehkan oleh syariat Islam, atas dasar tersebut maka masyarakat Desa Julobori mengadakan perjanjian penggarapan tanah perkebunan dengan sistem bagi hasil atau menyerahkan separuh, dari hasil tanah garapan buat penggarap dengan syarat penggarapannya hanya tinggal mengelola tanah perkebunan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan tanah perkebunan itu ditanggung pemilik tanah.

Dari uraian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan manfaat yang ditimbulkan dengan adanya penggarapan tanah melalui sistem bagi hasil sangatlah positif bagi kedua belah pihak. Agar kebutuhan antara keduanya dapat terpenuhi.

⁵ Imam Bukhari, *al-Jami'al-Musnad al-shahih*, (Beirut: Darul Fikr), h. 447

Sebab ada sebagian masyarakat yang punya lahan luas akan tetapi ia tak mampu menggarapnya, begitu pula sebaliknya banyak pekerja kebun yang punya keahlian untuk mengelolanya. Dengan adanya sistem bagi hasil ini maka kedua belah pihak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah adalah pengesahan atas pokok permasalahan yang akan di kaji dalam wujud pertanyaan yang memerlukan jawaban, berdasarkan dari latar belakang di atas, maka akan dijabarkan dua buah sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan usaha bagi hasil menurut Hukum Adat di Desa Julobori Kecamatan Palangga Kabupaten. Gowa ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah berdasarkan Hukum Adat di Desa Julubori ?

C. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan suatu imajinasi terhadap masalah yang penulis paparkan, berdasarkan atas pokok masalah dan sub masalah olehnya itu penulis memberikan. hipotesis sebagai berikut :

1. Sistem pelaksanaan bagi hasil di Desa Desa Julobori Kecamatan Palangga Kabupaten. Gowa yakni dilaksanakan setelah panen dan secara adil sesuai dengan kesepakatan/persetujuan antara pemilik lahan dan penggarapnya, dalam hal ini dibagi (1: 2) di mana pemilik lahan mendapat satu bagian sedangkan penggarap mendapat dua bagian dengan ketentuan bibit, obat-obatan ditanggung oleh

penggarap, yang telah disepakati dalam sistem bagi hasil menurut hukum islam yang diterapkan di Desa Desa Julobori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa bertujuan agar kehidupan masyarakat khususnya petani penggarap dan pemilik tanah dapat saling membantu, sehingga di antara satu dengan yang lainnya dapat saling mengisi.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil menurut Hukum Adat Desa Julubori merupakan salah satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara sesama yang tidak memiliki lahan usaha, sebagaimana Anas bin Malik r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Saw. :

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: انصر اخاك ظلما او مظلوما, قالو: يا رسول الله من تنصره مظلوما, فكيف تنصره ظلما؟ قال: تاخر فوق يديه

Artinya:

Diriwayatkan Dari Anas bin Malik r.a.- Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tolonglah saudaramu, apakah ia seorang penindas atau tertindas "orang-orang yang bertanya, ya Rasulullah! Telah menjadi ke wajiban kami menolong yang tertindas, tetapi bagaimana mungkin kami menolong penindas ? "Nabi SAW bersabda, "Tolonglah dia' dengan mencegahnya menindas orang lain (Bukhari).⁶

D. Defenisi Oprasional

Judul skripsi ini adalah : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah menurut Hukum Adat di Desa Desa Julobori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Unuk menghindari perbedaan pengertian dalam pembahasan judul skripsi ini maka penulis mengemukakan pengertiannya agar

⁶ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Cet.ke-4, (Damaskus:Da>r al-Fikr, 2004), hlm. 4685.

nantinya tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan beberapa kata yang terdapat dalam judul skripsi ini.

1. "Ekonomi Islam" ekonomi Islam ilmu tentang huku-hukum syaria'at aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta.⁷
2. "Sistem" berarti cara (metode) untuk melaksanakan sesuatu.⁸
3. "Bagi hasil" adalah perjanjian antara pemilik pada satu pihak dengan penggarap yakni penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggaraan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.⁹
4. "Penggarapan" berarti pekerjaan, pengelolaan dan sebagainya.¹⁰
5. "Tanah" ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk menanam bahan makanan.¹¹
6. "Hukum Adat" berarti adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.¹²

Berdasarkan pengertian istilah di atas, maka pengertian judul ini adalah suatu sistem yang berdasarkan pada prinsip dan syariat Islam dalam melakukan suatu kerjasama antara dua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian kerjasama (penggarapan sawah) dengan sistem bagi hasil menurut Hukum Adat di Desa Julubori

⁷ Abdullah Abdul Husain, at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*. (Cet. I; Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 955

⁹ Arief. S. *UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah. Dan Beberapa Masalah Hukum Agraria dan Hukum Tanah*, (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, t.th), h. 182

¹⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *op.cit.*, h. 215

¹¹ Arif S. *op. cit*

¹² Simanarki, at. Al., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 78

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan judul skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan dan tujuan sistem bagi hasil menurut hukum Adat di Desa Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa
2. Untuk memahami atau mengetahui lebih intensif mengenali penggarapan tanah dengan sistem menurut Hukum Islam, terutama sistem pelaksanaan dan tujuan bagi hasil di. Desa Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa serta pandangan hukum Islam terhadap penggarapan tanah dengan perjanjian bagi hasil menurut di Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.

Adapun kegunaan penelitian adalah diharapkan agar pembahasan ini dapat menjadi sumbangan motivasi dan sekaligus sebagai bahan informasi positif bagi masyarakat desa Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Bentuk Penggarapan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Menurut adat desa Julubori

Sebelum penulis membahas tentang sistem bagi hasil secara keseluruhan, maka terlebih dahulu mengemukakan istilah-istilah yang ditemukan syari'at Islam yang berkaitan dengan bagi hasil antara lain:

a. Musaqt

Merupakan Bentuk kerjasama usaha dalam bidang pertanian dengan syarat orang yang mempunyai kebun atau lahan menyerahkan kepada petani (tukang kebun) untuk digarap (ditanami), dan hasilnya dapat dibagi menurut perjanjian seperti, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ perjanjian itu dianjurkan oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Banyak orang yang mempunyai kebun atau lahan tetapi ia tidak dapat memeliharanya, sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun tetapi dapat mengerjakan kebun.

Menurut syafi'iyah dalam buku Hendi Suhendi fiqhi mu'amalah, *Musaqt* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan bagi pekerja memperoleh bagian dari buah yang dihasilkan pohon tersebut.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqhi Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 146

b. *Muzara'ah dan Mukharabah*

Muzara'ah yaitu kerjasama pengelola pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di mana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²

Sedangkan menurut ulama Hanbali *Muzara'ah* menyerahkan tanah kepada orang yang bercocok tanam (hasilnya) tersebut dibagi diantara kedua.³

Dari pengertian itu dipahami bahwa *Muzara'ah* suatu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apabila $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ atau menurut perjanjian diantara mereka (kedua belah pihak).

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *Mukharabah* adalah mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya, benihnya berasal dari pengelola.⁴

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa bentuk *Muzara'ah* dan *Mukharabah* adalah bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap dalam mengelolah lahan persawahan.

Karena itu penggarapan sawah dengan perjanjian bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pemilik dan penggarap. Terkadang ada pemilik yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam sedangkan pihak pekerja memiliki

² Antonio Syafi'I, *Bank Syari'ah dan Teori Praktek*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

³ Rahmat Syafi'I, *Fiqhi Mu'amalah*, (Bandung: Puastaka Setia, 2004), h. 206

⁴ *Ibid*, h. 302

kemahiran dalam mengelolah sawah atau tanah perkebunan namun dia tidak memiliki tanah maka Islam mensyari'atkan kerjasama seperti ini sehingga para pekerja (penggarap) lebih diperhatikan oleh pemilik tanah atau sawah tersebut.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil (*Mukharabah / Muzara'ah*) menurut adat Desa Julubori yakni mengerjakan sawah orang dengan memperoleh bagian dari hasilnya, sedang bibit, obat-obatan yang dipergunakan dari penggarap sawah, dibolehkan oleh syari'at Islam karena ketentuan hasil yang diperoleh dari usaha pihak penggarap sawah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah (10:4) yang berbunyi sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian mu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya.⁵

Untuk menghindari terjadinya kejadian perselisihan maka perintah kepala desa

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47

yang berwenang memandang perlu mengadakan undang-undang yang mengatur perjanjian penggarapan sawah dengan bagi hasil, antara pemilik dan penggarap atas dasar yang adil. Demi untuk menjaga agar penggarap dan pemilik tanah tidak mengambil bagian atau harta sesamanya dengan jalan bathil sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Dalam kitab Tafsir Al-Maraghi, ayat tersebut dijelaskan bahwa kata *bathil* berasal dari kata *bathal* dan *al-buthlan*, berarti kesiasiaan dan kerugian yang menurut syara' adalah mengambil harta tanpa mengganti syara' hakiki yang biasa tanpa kerelaan pemilik tersebut.⁶

Kemudian selanjutnya bahwa

harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dan orang yang dimakan hartanya, masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya yang dimaksudkan dengan memakan

⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 25

di sini adalah mengambil dengan cara bagaimanapun cara diungkapkan dengan tata makan karena ia merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan. Harta disandarkan kepada semua orang (kalian) dan tidak dikatakan janganlah sebahagian memakan harta sebahagian yang “lain” dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa saling bantu-membantu di dalam menjamin hak-hak dan maslahat-muslahatnya.⁷

Hal ini telah di atur di dalam Al-Qur'an berdasarkan firman Allah swt. Dalam surah Al-Anfal ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

*(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya).*⁸

Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan orang yang berjanji lalu ia mengkhianati janjinya maka ia termasuk orang yang munafik.

Pandangan ulama mazhab terhadap perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil (Muzara'ah) yaitu:

1. Mazhab Hanafi (Hanafiah)

Hukum Muzara'ah yang sah adalah memiliki manfaat tanah yang spontanitas dan bersekutu dalam memungut biaya hasil tanaman, dengan perjanjian akan mendapatkan hasil dari padanya sesuai apa yang telah disepakati secara bersama. Dan bila perjanjian itu di syariatkan bahwa benih ditanggung oleh pemilik tanah, akan tetapi sebelum benih ditaburkan atau disemaikan pemilik punya hak membatalkan

⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 270

perjanjian dengan tanpa alasan apapun karena dikawatirkan tersia-sia benih dengan tanpa faedah. Sedangkan penggarap yang tidak punya benih, ia punya hak meneruskan akad semata-mata karena ijab dan qabul.

Sedangkan hukum Muzara'ah yang bathil yaitu penggarap tidak berkewajiban melakukan upaya pengelolaan apapun, apabila benih disediakan oleh pemilik tanah maka penggarap memperoleh upaya yang layak dan bila benih dari penggarap maka pemilik tanah memperoleh perongkosan sebesar nilai harga tanahnya dan yang pantas. Oleh sebab itu dalam Muzara'ah yang batal tidak wajib dikeluarkan selama tanah tidak diolah. Jadi kalo penggarap tidak mengelolah tanah, maka ia tidak boleh meminta upah kerja.⁹

2. Mazhab Malik (Malikiyah)

Hukum Muzara'ah adalah boleh (*Jaiz*) yakni apabila segala sendi yang menjadikan Muzara'ah itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akad menyewakan tanah tidak memandang sesuai yang terlarang.
- b. Kedua orang yang bekerjasama hendaknya bersama-sama memperoleh keuntungan.
- c. Mencampurkan bahan makan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama dan masing-masing dari dua orang yang bekerjasama mengeluarkan benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqhul Alaa Al- Muzahibul Arba'ah*, Jilid IV, (Semarang: As-syifa, 1994), h. 31-32

sifatnya.¹⁰

Adapun hukum-hukum kerjasama pengelola tanah batal ada dua macam:

- 1) Batalnya kerjasama itu telah diketahui kecuali setelah sebelum dimulainya pelanggaran maka hukum dari pada kerjasama ini menjadi batal.
- 2) Segi batalnya belum diketahui kecuali setelah melakukan pengolahan tanah, bentuknya ada 6 macam praktek yaitu:
 - a) Dua orang yang telah melakukan kerjasama itu secara bersama-sama mengelolah tanah perkebunan.
 - b) Dua orang yang melakukan kerjasama melakukan pengelolahan lahan tanah bersama-sama, satu pihak hanya memodalkan mengelolah saja sedangkan pihak yang lain menyediakan benih dan alat-alat pertanian.
 - c) Salah satu pihak yang menganggap, di samping itu ia juga menyediakan benih sedangkan tanah disediakan oleh pihak.
 - d) Salah satu pihak yang mengolah tetapi ia juga menyediakan benihnya adalah pihak lain.
 - e) Salah seorang yang melakukan pengolahan sedangkan penyediaan tanah dan benih oleh dua orang.
 - f) Salah seorang hanya melakukan pengolahan itu saja, sedangkan tanah dan alat-alat perkebunan disediakan oleh pihak kedua.

3. Mazhab Hambali (Hambaliyah)

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum muzara'ah adalah *Jaiz*

¹⁰ *Ibid*, h. 38-40

artinya boleh dilakukan dan bukan aqad yang lazim artinya mesti diteruskan, karena itu masing-masing pihak diperkenankan membatalkan aqad. Oleh karena itu kerjasama muzara'ah dianggap sah menurut hukum, apabila memenuhi beberapa hal yaitu:

- a) Orang yang melakukan perjanjian kerjasama itu mesti harus mempunyai keahlian, artinya berakal sehat.
- b) Harus diketahui jenis benih dan kadarnya yang diperlukan, jika benih tidak diketahui, maka tidak salahlah aqad kerjasama.
- c) Menentukan tanah dan ukuran yang dijelaskan.
- d) Menentukan macam yang ingin ditanam.¹¹

Kerjasama pengolahan tanah yang batal secara hukum, maka tanaman menjadi milik bagi orang yang mempunyai benih dan ingin berkewajiban memberi upah kepada pengelolanya. Dan dinilai tidak sah bila tanah, benih, pengolahan dan alat pertanian sedang pihak lain mengairi saja.¹²

4. Mazhab Syafi'i (Syafi'iyah)

Ulama Mazhab Syafi'imenganggap batal kerjasama yakni kerjasama mengelolah sawah atau tanah dengan pengertian penyewaan tanah imbalan hasil yang didapat dari padanya, atau mempekerjakan penggarap dengan upah berupa hasil darinya. Dan apabila seseorang penggarap telah mengelolah tanah dengan akad yang batal tersebut maka hasil dari tanah garapan itu menjadi milik orang

¹¹ Lihat *Ibid*, h. 40-41

¹² *Ibid*.

yang punya tanah. Si pemilik tanah ini berkewajiban memberikan upah kepada pengelolah dan mengembalikan segala perongkosan yang dibelanjakan dalam tempoh mengelolah tanah tersebut.

Kerjasama dinilai sah apabila telah memenuhi tiga macam syarat yaitu:

- a) Benih disediakan oleh kedua belah pihak , sebab bagian masing-masing yang akan diperoleh telah di tentukan dari hasil lahan dalam mengikuti benih yang telah dikeluarkan.
- b) Masing-masing pihak mengambil bagian senilai dengan apa yang telah ditanam, sebagian modal dengan ongkos tanah senilai dengan apa yang telah ditanam sebagai modal, bila ongkos tanah senilai sepertiga hasil, maka tidak sah mensyariatkan akan menganut separuh dari hasil.
- c) Pemilik tanah berkata kepada penggarap, saya mempekerjakan engkau separuh tanah dengan nilai separuh tanah pengolahan dan sapi sehingga ada praktek menyewakan tanah dengan imbalan dari padanya.¹³

Dengan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa memperoleh *Muzara'ah* bagi hasil secara terpisah atau secara bersamaan, karena selain dari praktek Nabi dan juga praktek sahabat-sahabatnya yang bisa melakukan perjanjian bagi hasil tanaman. Dengan demikian hukum *Muzara'ah* adalah sah atau dibolehkan oleh syari'at Islam karena tidak ada yang saling dirugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu bila kerjasama tersebut dilaksanakan atas dasar merugikan dari salah satu pihak pemilik tanah atau penggarap, maka *Muzara'ah* semacam ini adalah batal atau

¹³ *Ibid.*, h. 42-43

tidak dibolehkan oleh syari'at Islam.

Adapun bentuk penggarapan sawah pada umumnya di desa Julubori adalah sepertiga bahagian, di mana pemilik tanah mendapat satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian dengan ketentuan bahwa bibit, obat-obatan ditanggung oleh penggarap.

B. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Desa Julubori

Masyarakat Desa Julubori jauh sebelum datangnya Islam, telah memiliki kepercayaan animisme yang bertitik tolak adanya suatu kekuasaan gaib yang sifatnya supranatural yang berada di luar dirinya.

Masyarakat Desa Julubori digolongkan sebagai kepercayaan animisme, sebab dalam manjalin hubungan dengan kekuatan yang supranatural tersebut, diwujudkan dalam bentuk menyembah berupa penyuguhan sajian kepada roh-roh tersebut nenek moyang mereka, hal ini dilakukan melalui benda-benda yang dianggap memiliki daya religius, tempat bersemayamnya roh-roh yang dapat mempengaruhi pri hidup dan penghidupan manusia.

Dengan melihat kebutuhan tanah di Desa Julubori dan lahan pertanian cukup luas, sementara penduduk Desa Julubori sangat kurang, akhirnya penduduk berdatangan dan berbagai daerah yang menganut agama Islam.

Penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima oleh masyarakat bawah, kemudian

berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas disebut bottom up. Kedua, Islam diterima langsung oleh elite penguasa kerajaan kemudian disosialisasikan dan berkembang pada lapisan masyarakat bawah disebut top down. Penerimaan Islam di Gowa menurut penulis sejarah Islam, memperlihatkan pola yang kedua.

Kerajaan yang mula-mula memeluk Islam dengan resmi di Sulawesi Selatan adalah kerajaan kembar Gowa-Tallo. Tanggal peresmian Islam itu menurut lontara Gowa dan Tallo adalah malam Jum'at, 22 September 1605, atau 9 Jumadil Awal 1014 H. Dinyatakan bahwa Mangkubumi kerajaan Gowa / Raja Tallo I Mallinggaeng Daeng Manyonri mula-mula menerima dan mengucapkan kalimat Syahadat (Ia di beri gelar Sultan Abdullah Awwalul Islam) dan sesudah itu barulah raja Gowa ke-14 Mangenrangi Daeng Manrabia (Sultan Alauddin). Dua tahun kemudian seluruh rakyat Gowa-Tallo memeluk agama Islam berdasar atas prinsip *cocius region eius religio*, dengan diadakannya shalat Jumat pertama di masjid Tallo tanggal 9 November 1607 / 19 Rajab 1016 H.

Adapun yang mengislamkan kedua raja tersebut ialah Datu ri Bandang (Abdul Makmur Chatib Tunggal) seorang ulama datang dari Minangkabau (Sumatera) ke Sulawesi Selatan bersama dua orang temannya yakni Datu Patimang (Chatib Sulaeman) yang mengislamkan pula Raja Luwu La Pataware Daeng Parabung dan Datu ri Tiro (Chatib Bungsu) yang menyebar Agama Islam di Tiro dan sekitarnya.

Sekitar enam tahun kemudian, kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan pun menerima Islam. Penyebarannya di dukung oleh Kerajaan Gowa sebagai pusat kekuatan pengislaman. Kerajaan bugis seperti Bone, Soppeng, Wajo dan Sidenreng, berhubung karena menolak, akhirnya Raja Gowa melakukan perang, karena juga dianggap menentang kekuasaan Raja Gowa. Setelah takluk, penyebaran Islam dapat dilakukan dengan mudah di Kerajaan Bugis.¹⁴

Walaupun mereka telah memeluk agama Islam, namun masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat Desa Julubori yang bercampur aduk antara ajaran Islam dengan sistem penyebaran kepercayaan penyebaran animisme, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh serta menodai kesucian ajaran agama Islam.¹⁵

Di antara penyimpangan-penyirnpangan ajaran agama Islam yang mereka sering campur adukkan inilah bila mereka akan membacakan doa orang tua dengan mengikut sertakan bahan-bahan makanan makanan serta nasi yang terbuat dari beras ketan, dipotongkan ayam, membakar kemenyan, pisang dan masih banyak lagi, berupa bahan makanan lain yang mereka ikutkan, begitu pula dalam hal menaiki rumah baru, kadang mereka menanam sesuatu bungukusan pada tertengahan tiang rumah yang dibangun, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang senantiasa menyimpang dari ketentuan yang sebenarnya.¹⁶

¹⁴ <http://wawan-sejarahmakassar.blogspot.com/2011/03/kerajaan-gowa.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2013.

¹⁵ Jarre, Imam Desa Julubori, "Wawancara", Tanggal 29 November 2012

¹⁶Dg. Raja, Tokoh Masyarakat "Wawancara" Tanggal 29 November 2012

Hal yang demikian itu terjadi, karma pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang masih kurang, sehingga mereka mengamalkan ajaran agama itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, meskipun para ulama yang memberi penjelasan kepada masyarakat tentang keesaan Tuhan namun demikian sebagian masyarakat kurang mengerti dan memahami atau mengerti apa yang dimasukkan para ulama, bahwa kadang-kadang masyarakat. mengerti dan memahami bahwa apa yang ia lakukan adalah menyimpang dari ajaran Islam akan tetapi adanya itu sudah mendarah daging sehingga sulit untuk meninggalkannya. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka mengikis menghilangkan adat yang bertentangan dengan ajaran Islam sebab semua bentuk pengamalan yang menyimpang tersebut di atas menyebabkan masyarakat menjadi musyrik, yang berarti nilai-nilai tauhid dari masyarakat tersebut mulai rusak, kalau nilai sudah rusak maka akan semakin banyak penyimpangan yang dilakukan kehidupan mereka sehari-hari.¹⁷

Kalau ditinjau dari segi kualitas maka sebenarnya semua masyarakat Desa Julubiri adalah beragama Islam akan tetapi bila ditinjau dari kuantitas keIslaman mereka masih sangat nihil, karena banyak di antara mereka yang mengaku beriman tetapi tidak mau berpuasa, dan sebagainya. Di samping itu masih ada di antara

¹⁷ *Ibid*

mereka yang mengaku beriman tetapi mereka juga masih senang minum-meminum yang memabukkan, berjudi, dan sebagainya.¹⁸

Agar hal tersebut di atas tidak terjadi, maka perlu ada usaha-usaha untuk menanggulangi hal tersebut, baik dari pihak pemerintah, para tenaga pendidik, tokoh-tokoh agama serta masyarakat yang baik dan benar. Karena pada dasarnya manusia itu ingin semua baik karena di dalam dirinya ada potensi kebaikan, Cuma potensi kebaikan tadi tidak mendominasi adalah potensi kejahatan, sehingga kadang mereka lebih cenderung menyimpang dari nilai-nilai ajaran yang mereka anut itu.

C. Hak Dan Kewajiban Pemilik Sawah dan Penggarap Menurut Adat dan Hukum Islam

1. Hak dan Kewajiban pemilik sawah

Pemilik tanah dalam perjanjian hasil berhak memperoleh bagian dari hasil sawahnya pada saat dilakukan panen sesuai dengan ini perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebagian dalam hal ini berarti sepertiga bagian di mana satu bagian bagi pemilik sawah dan dua bagian untuk penggarap dengan ketentuan yang menyediakan seluruhnya termasuk bibit, pupuk, dan obat-obatan ditanggung penggarap.¹⁹

Di samping itu pemilik tanah pula untuk memperoleh tanahnya kecuali dari

¹⁸ Bate, Tokoh Agama di Dusun Bontobila, "Wawancara," Tanggal 30 November 2012

¹⁹ Tutu, Tokoh Masyarakat Dusun Borong Jambu Desa Julubori, "Wawancara", Tanggal 29 November, 2012.

penggarap dalam keadaan baik. Jika perjanjian bagi hasil sudah dilanjutkan lagi oleh penggarap karena salah satu pihak mereka dirugikan atau karena sebab-sebab lain.

Selain dari hak pemilik di atas, maka pemilik mempunyai beban kewajibannya yang harus dilaksanakan, yaitu kewajiban untuk membayar pajak tanah yang bersangkutan. Kewajiban itu tegas dinyatakan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, di mana pasal ini memberikan kewajiban kepada pemilik untuk membayar tanah yang bersangkutan dan melarangnya apabila penggarap adalah pemiliknya sendiri. Jadi secara formal kewajiban membayar pajak ada pada pemilik tanah, hal ini disebabkan dengan ketentuan yang berlaku sekarang.

2. Hak dan Kewajiban Penggarap

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarapnya selain meletakkan hak dan kewajiban pemilik tanah juga meletakkan hak dan kewajiban penggarap.

Adapun yang menjadikan dari penggarap dalam hal perjanjian bagi hasil tersebut dalam memperoleh sebahagian dari tanah garapnya sebagian imbalan jasanya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Selain hak dari penggarap sebagaimana yang diuraikan di atas, maka terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggarap, kewajiban tersebut yaitu memelihara atau mengerjakan tanah persawahan tersebut secara baik dan teratur sebagaimana seorang pemilik sendiri. Bila penggarap sudah tidak mampu mengerjakannya tanah tersebut secara baik dan teratur, maka penggarap berkewajiban

mengembalikannya kepada pemilik tanah sesuai ditegaskan dalam pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian,²⁰ akan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanah secara baik seperti ia mendapatkan sebelumnya.²¹

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa penggarap berkewajiban mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik. Pengertian dalam keadaan baik tidak dapat dijelaskan secara tegas, tetapi dapat dikatakan bahwa penggarap mengembalikan tanah pemilik Dalam keadaan tidak merugikan pemilik tanah, tergantung dari keadaan dan ukuran setempat.

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling memiliki timbal balik dalam suatu transaksi. Hak adalah suatu pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak menjadi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam metode hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, dengan hak seseorang terhadap kewajiban orang lain untuk saling menghormati.²² Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan atau dilaksanakan.

Dalam kamus terdapat banyak pengertian dan kata hak, salah satu dari kata “hak”

²⁰ Sekretariat Negara RI, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: 1960), h. 8

²¹ Hasil “Wawancara” Dengan Dg. Ansar, Kepala Desa Julubori, Tanggal 30 November 2012.

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikanan Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h.

menurut bahasa adalah: kekuasaan yang benar atas dasar sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah: wewenang menurut hukum, sedangkan menurut ulama fiqhi hak antara lain:

1. Menurut sebahagian para ulama *Muta'akhirin*: “hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara”.
2. Menurut Syekh Ali al-Khafiki (asal Mesir) “Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara”.
3. Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (ahli fiqhi Yordaniyah asal Suria): “Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ sesuatu kekuasaan atau taklif”.
4. Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqhi mazhab Hanafi): “Hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi”.

Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh pemilik dan penggarap sawah karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kadar minimum dan maksimum bagian yang diterima oleh keduanya harus ditetapkan sebelum tanah diolah oleh penggarap.²³

Dengan demikian pemilik tanah berhak memperoleh sebahagian dari hasil penggarapan sawahnya pada saat dilakukannya panen yang sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati secara bersama, dan kewajiban itu telah ditegaskan

²³ Adzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 342

dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960. Undang-Undang tersebut menimbang bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik;

Dari uraian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa di mana hak dan kewajiban pemilik tanah atau sawah dan penggarap yang telah di tetapkan di Desa Julubori yang sesuai dengan hukum Islam, dan itu semua diterapkan demi untuk menjaga agar penggarap dan pemilik tanah tidak mengambil bagian atau harta sesamanya dengan jalan bathil sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

D. Penghasilan Utama Masyarakat Desa Julubori

Keadaan sosial ekonomi Masyarakat Desa Julubori pada umumnya adalah bermata pencaharian sebagai petani sawah dan berkebun. Selain sebagai petani, ada juga sebagai pedagang, buruh, pegawai, dan sebagai montir (perbengkelan). Demikian dari pada lapangan kehidupan masyarakat di Desa Julubori, baik itu pendatang yang menetap di Desa tersebut maupun penduduk aslinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL I
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Julubori

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang
----	------------------------	--------------

1	Pegawai Negeri sipil	21 Orang
2	Pedagang	17 Orang
3	Buruh	25 Orang
4	Petani	309 Orang
5	Tukang	22 Orang
6	Karyawan	19 Orang
7	Sopir	8 Orang
8	Montir	9 Orang
9	Pensiunan	6 Orang
10	TNI	4 Orang
11	Bidan	2 Orang
12	Perawat	2 Orang
	Jumlah	444 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Julubori Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya, yaitu pendidikan sebagai Pegawai Negeri Sipil 21 orang, penduduk, penduduk sebagai pensiunan berjumlah 6 orang, penduduk sebagai pedagang berjumlah 17 orang, penduduk sebagai petani berjumlah 309 orang, penduduk sebagai tukang/buruh berjumlah 47 orang, penduduk sebagai karyawan berjumlah 19 orang, dan penduduk sebagai sopir berjumlah 8 orang, penduduk sebagai montir berjumlah 9 orang, penduduk sebagai bidan dan perawat masing-masing berjumlah 2

orang, Jadi secara keseluruhan berjumlah 444 orang, sedangkan yang paling menonjol adalah petani yang berjumlah 309 orang.

Adapun mengenai potensi ekonomi di kembangkan di Desa Julubori dapat dilihat dari table berikut:

TABEL II
Jumlah Potensi Ekonomi Yang di Kembangkan di Desa Julubori

No	Jenis Potensi	Jumlah Unit
1	KUD	1 Unit
2	KIOS	13 Unit
3	BENGKEL	5 Unit
4	INDUSTRI KECIL	6 Unit
5	PASAR	1 Unit
	Jumlah	26 Unit

Sumber Data: Kantor Desa, Tahun 2012

Berdasarkan tabel tersebut, maka perincian jumlah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Desa Julubori, yaitu potensi Koprasi Unit Desa (KUD) berjumlah 1 unit, kios berjumlah 13 unit, bengkel berjumlah 5 unit, industri kecil 6 unit, dan pasar 1 unit. Adapun hasil bumi yang di hasilkan itu kemudian disebar ke pasar-pasar untuk kemudian di jual sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para konsumen.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Dimana pada penelitian ini memerlukan banyak referensi dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dari judul skripsi yang kemudian menggeneralisasikan langsung dengan keadaan di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui sistem penerapan bagi hasil yang di gunakan oleh para masyarakat Desa Julubori Kecamatan Pallangga dalam pembagian hasil pertanian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme bagi hasil penggarapan sawah menurut Adat di Desa Julubori yang di kaitkan dengan hukum Islam. Adapun target dan waktu penelitian dimulai dari 25 November s/d 25 Desember 2012.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian populasi seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut:

Menurut Suharsimi Arikunto :

“Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹ Sementara itu Hadari Nawawi, sebagaimana yang di kutip Margono menjelaskan, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes ataupun peristiwa-peristiwa.”²

Pengertian lain juga dikemukakan oleh Sugiyono, yakni :

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.”³

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti apabila seluruh objek ini bersifat homogen, maka pada akhir penelitian nanti akan mudah menarik kesimpulan secara generalisasi, meskipun pada penelitian, peneliti mengambil kesimpulan setelah mengidentifikasi sebagian objek.

Kaitannya dengan penelitian dalam skripsi ini, maka yang menjadi objek adalah populasi, dalam penelitian ini adalah para pemilik tanah dan para penggarap yang menerapkan sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten sebanyak 309 orang petani.

2. Sampel

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa jika keseluruhan objek (populasi) itu sifatnya homogen, dapat ditempuh cara yang paling efektif untuk meneliti objek, yakni cukup meneliti sebagian dari keseluruhan objek yang nantinya akan disimpulkan dengan cara generalisasi.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. Revisi, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 108

² Mukhtar, , Bandung. Wahana, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. VIII; Bandung: CV. Alfabeta, 2000), h. 57

Lebih jelasnya sampel adalah merupakan himpunan sebagian populasi.⁴ Pengertian sampel yang sederhana ini, paling tidak sudah dapat dipahami bahwa, jika terlalu besar jumlah dari populasi dan tidak mungkin diidentifikasi satu persatu pada hal sifatnya homogen, maka cukuplah sebagian dari populasi yang diteliti.

Untuk objek penelitian pada skripsi ini penulis mengambil sampel khusus sistem bagi hasil penggarap sawah menurut adat yang ditinjau dari hukum Islam yang diterapkan di Desa Julubori yakni sebanyak 30 orang.

C. Metode Pendekatan

Dalam penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

- a. Syar'i yakni mendekati masalah yang dibahas dengan berdasarkan pada sumber syariat Islam yaitu al-Quran dan sunnah nabi
- b. Pendekatan sosiologi yakni mendekati masalah yang dibahas dengan melihat gejala atau interaksi sosial yang terjadi dikalangan masyarakat.

D. Metode pengumpulan data

- a. Library recarch yaitu penulis menggunakan penelitian lewat kepustakaan yakni dengan membaca buku atau kitab yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan bahan tertulis yang dihasilkan dari hasil wawancara para tokoh masyarakat ataupun tokoh agama di Desa Julubori dan para pemilik tanah dan penggarap

⁴ Mukhtar, Bandung., *Op Chit*. h. 42

yang kemudian dikutip hal-hal yang dianggap penting baik melalui kutipan langsung ataupun kutipan tak langsung,.

- b. Fieled research yaitu penulisan dengan mengamati masalah yang terjadi menyangkut dengan sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Julubori menurut hukum adat yang kemudian di tinjau dari hukum islam dan usaha para penggarap maupun pemilik sawah serta para tokoh masyarakat maupun para tokoh agama di Desa Julubori.

Tekhnik-tehknik yang dilakukan antara lain:

1. Observasi yaitu berusaha untuk memahami situasi masyarakat tersebut sehingga dapat digambarkan beberapa latar belakang mengenai sistem Bagi Hasil penggarapan menurut adat yang kemudian di tinjau dari hukum islam.
2. Interview melakukan wawancara, langsung dengan masyarakat sekitar dan para penggarap maupun pemilik tanah yang menerapkan sistem bagi hasil penggarapan sawah menurut adat yang kmudian di tinjau dari sudut pandang hukum islam serta pihak-pihak yang cukup berkompeten dalam hal ini, diantaranya:
 - a. Pemuka adat Desa Julubori
 - b. Tokoh Agama
 - c. Tokoh Masyarakat

3. Dokumentasi meneliti langsung beberapa tulisan atau hasil dari pada wawancara mengenai sistem bagi hasil penggarapan sawah menurut adat yang di tinjau dari hukum islam.

Untuk kelengkapan data suatu karya penelitian perlu melakukan rancangan atau prosedur penelitian secara sistematis dan terencana. Hal ini sangat membantu seorang peneliti menentukan permasalahan yang hendak dibahas.

Dalam penelitian, skripsi ini penulis menggunakan prosedur penelitian yaitu:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini penulis melakukan study pustaka dengan cara mengumpulkan tulisan tua, pernyataan-pemvataan yang terdapat dalam literatur yang berkaitan dengan judul penelitian dan nantinya teori-teori atau pernyataan tersebut akan dilihat dan dibuktikan dilapangan. Sebagai wujud nyatanya. Sebelum terjun kelapangan, penulis telah membuat format pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan dimana pertanyaan-pertanyaan dimaksud disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.

2. Tahap pengumpulan data

Untuk data kepustakaan penulis mengumpulkan data melalui karya-karya ilmiah, himpunan perundang-undangan yang berkaitan dengtan judul skripsi yang selanjutnya dikutip secara langsung maupun tidak

langsung, sementara untuk data lapangan pengumpulannya dilakukan dengan tehnik yang disebutkan sebelumnya yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tahap pengelolaan data

Sebelum melakukan analisis data maka telah dilakukan pemeriksaan kembali dat- data dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan

E. Analisis Data

Tehnik analisis data yang di pakai dalam penulisan skripsi ini adalah analisis yang hersifat deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada atau gejala yang ditemui dilapangan, kemudian di deskripsikan.

Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu analisis yang digunakan dengan cara umum lalu diuji atau disimpulkan dengan melihat fakta fakta yang khusus.
- b. Induktif yaiu analisis data yang bertitik tolak dari data-data (fakta yang ada) lalu mengambil kesimpulan dengan cara menggenaralisasi secara umum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Julubori

Desa Julubori sebelumnya hanyalah sebuah kampung kecil yang di diami oleh penduduk suku bugis Makassar dan para masyarakat asli Gowa yang di mana mereka hidup secara rukun di dalam kampung yang lumayan kecil.

Eksistensi dari pada Desa Julubori pada awalnya hanyalah merupakan daerah dibawah pemerintahan dari pada Desa Julukanayyah. Seiring jalannya waktu para tokoh masyarakat Desa Julubori mengeluarkan inisiatif yang di prakarsai oleh seluruh masyarakat Desa Julubori itu sendiri dan ditunjang oleh semakin bertambahnya penduduk dan berbagai factor yang dapat dipertimbangkan seperti, ekonomi, factor wilayah dan factor lainnya yang dapat memenuhi syarat agar terbentuknya Desa baru.

Dengan pertimbangan beberapa syarat tersebut di atas hasil dari pada pembentukan sebuah Desa yang baru itu dimulai pada tanggal 19 Januari 1975, Desa baru resmi terbentuk menjadi sebuah Desa yang telah memenuhi syarat terbentuknya suatu Desa, yang di mana desa baru tersebut adalah hasil dari pada pemekaran dari pada Desa Julukanaya yang sekarang berdiri dengan sendirinya dibawah naungan kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan nama “ Desa Julubori”.

Setelah melalui proses yang begitu lama untuk memenuhi syarat sebuah Desa, akhirnya Desa Julubori pun resmi menjadi sebuah Desa dalam arti terpisah dari pemerintahan desa Julukanaya. Dengan terpisahnya Desa Julubori Dari Desa

Julukanayah, Desa Julubori mulai membenah diri dengan membentuk roda pemerintahan yang pertama kalinya yang di mana yang mengendalikan roda pemerintahan tersebut adalah Hamzah Yusuf (1975-1981), dan dilanjutkan oleh Syahrial Runrung (1981-1986), Rewang (1986-1991), Baso Sunggu (1991-1996), Jamaluddin (1996-2001), Kamarudding (2001-2006) Drs. Ansar (2006-sekarang.)¹

B. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Julubori

1. Keadaan Geografis

Desa Julubori adalah merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pallangga bagian selatan Kabupaten Gowa dengan jarak Km dari Ibu Kota Kecamatan sekitar 131 Km dari kota Kabupaten, dan 303 Km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi selatan ke Desa Julubori.

Adapun batas-batas Desa Julubori adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Julu Pa'mai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa To'do'toa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bontoramba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Je' ne'tallasa

Adapun keadaan alam yang dimiliki Desa Julubori yang terdiri dari tanah yang datar. Karena bentuk dari permukaan tanah Desa Julubori yang datar yang di mana para masyarakat yang bermukim di Desa Julubori tersebut memanfaatkannya untuk digunakan sebagai tempat untuk membangun

¹Aziz, Staf di Kantor Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa, *Wawancara*, 4Desember, 2012.

pemukiman, areal perkebunan, dan areal persawahan, yang di mana daerah permukaan tanah yang datar tersebut kebanyakan terdapat rawa-rawa yang sekarang dijadikan sebagai areal persawahan bagi para petani.

Jika dilihat dari segi iklim di Desa Julubori adalah sebagaimana dengan daerah sekitarnya yang terdiri dari dua musim yang silih berganti dalam setahun, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dan lebih khususnya untuk Desa Julubori, musim hujan biasanya berada pada bulan April sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau berada pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober yang di mana biasanya para petani maupun penggarap senantiasa memanfaatkan waktu dan kesempatan di bulan April hingga bulan Mei tersebut untuk memaksimalkan hasil panen mereka dengan baik sebelum datangnya musim kemarau.

Luas wilayah Desa Julubori secara keseluruhan adalah 2519 Hektar Area, dan untuk lebih jelasnya mengenai luas dari pada wilayah Desa Julubori berdasarkan penggunaan tanah dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL III
Luas Tanah di Desa Julubori

No	Tanah	Luas (Ha)
1	Persawahan	1012 H
2	Perkebunan	820 H
3	Pemukiman	559 H
4	Perkuburan	1 H
	Jumlah	2392

Sumber Data : Kantor Desa Julubori, Tahun 2012

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa, luas tanah yang di olah atau di dimanfaatkan adalah seluas 2392 Ha, sedangkan yang belum dimanfaatkan atau diolah adalah 227 Ha. Adapun persawahan di Desa Julubori adalah Persawahan dengan sistem Irigasi, sedangkan perkebunan masyarakat di Desa Julubori adalah perkebunan Langsung, Pisang dan Rambutan yang di mana hasil perkebunan masyarakat Desa Julubori tersebut dapat di hasilkan tiga kali panen dalam setahunnya.

2. Keadaan Demografis

Desa Julubori terdiri dari tiga dusun yang jumlah penduduknya 4.934 jiwa, sebagaimana rinciannya sebagai berikut:

- a. Dusun Paku jumlah penduduknya sebanyak 1725 jiwa, (Laki-laki sebanyak 749 jiwa dan perempuan sebanyak 976 jiwa)
- b. Dusun Borong Jambu.jumlah penduduknya sebanyak 1594 jiwa, (Laki-laki sebanyak 632 jiwa dan perempuan 962 jiwa)
- c. Dusun Borong Bilalang jumlah penduduknya sebanyak 1183 jiwa, (Laki-laki sebanyak 491 jiwa dan perempuan 692 jiwa)
- d. Dusun Bontobila Jumlah Penduduknya sebanyak 432 jiwa, (Laki-laki sebanyak 240 Jiwa dan perempuan 192 jiwa)

Pada penduduk setempat dilihat dari segi pencahariannya, maka akan dijumpai bahwa ada pegawai negeri, pedagang, peteni kebun, dari semua sumber pencaharian masyarakat Desa Julubori, maka jelaslah bahwa salah satu sumber pencaharian adalah petani kebun yang sangat besar hasilnya, umumnya masyarakat yang ada di Desa tersebut rata-rata memiliki lahan perkebunan, di mana tiap kepala keluarga hampir semuanya menanam langsung, pisang, maupun

rambutan sebagai salah satu penambah penghasilannya. Dan ada pula salah satu penghasilan yang cukup di kenal di Desa Julubori itu sendiri yang terdapat di Dusun Paku yaitu para pengrajin dari pada hasil tanam pohon kapok yang dapat di kreatifitaskan oleh para masyarakat di Desa Julubori khususnya para warga Dusun Paku itu sendiri.

Dari hasil kreativitas masyarakat Desa Julubori tadi yang berasal dari Pohon Kapo' yang telah di olah menjadi sebuah hasil dari pada kreativitas tangan manusia tersebut, telah banyak terjual hingga diluar daerah Kabupaten Gowa, bahkan hasil dari Pohon Kapo' tersebut yang cukup dikenal telah dikirim kedaerah-daerah sulawesi pada khususnya untuk kmudian di olah kembali untuk di jadikan sebagai kasur, bantal maupun sebagai hasil kreativitas lainnya yang bahan utamanya dari kapo'.

Adapun bila ditinjau dari beberapa suku yang berdiam di Desa Julubori sangatlah beraneka ragam mulai dari suku Bugis, suku Makassar, dan suku Luwu / Toraja, yang di mana suku-suku tersebut hidup berdampingan dengan rukun dan damai antara suku satu dengan yang lainnya tanpa ada perbedaan sedikitpun.

C. Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Petani Penggarap Sawah di Desa Julubori

Sebelum penulis membahas hasil dari pada analisis sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Julubori yang di mana memiliki 2 indikator yang menjadi pembahasan dalam analisis tersebut yaitu, faktor penyebab timbulnya persawahan dengan sistem bagi hasil hingga bentuk perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil menurut adat di Desa Julubori, maka terlebih

dahulu dikemukakan istilah yang berkaitan dengan bagi hasil yang di temui dalam Adat desa Julubori atau istilah para ahli, yaitu:

a. Bageanna

Merupakan bentuk kerjasama diantara pemilik dan penggarap dalam bidang pertanian, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Meskipun di Desa Julubori terdapat banyak suku akan tetapi hasil yang dilaksanakan di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di sebut dengan istilah Bageanna.

b. Bagi hasil menurut para ahli

1. Seorang penulis ulung Mengenai bagi hasil yang bernama “ Jhenny” mengemukakan bahwa bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, di mana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal dan pekerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil *bruto* tanah tersebut dalam bentuk natural dengan perkembangan usaha tani.
2. Kobler memberikan pengertian tentang bagi hasil sebagai. Berikut: pengertian bagi hasil menunjukkan hubungan antara pemilik sebidang atau orang lain yang berhak menggunakannya, dengan menggarap. Bagi basil merupakan suatu bentuk usaha di mana pemungutan bunga (*rente rekker*) tidak mengeploitasi sasaran usaha dengan kerjasama sendiri atau sebagai usaha yang memimpin semua fungsi perusahaan. Orang yang menguasai sebidang tanah tersebut menyeluruh orang lain menggarapnya; yang menyerahkan tanah dan penggarap membagi bersama basil bidang tanah itu menurut perbandingan umum yang tetap atau menurut perbandingan

yang ditetapkan secara khusus.²

3. Bagi hasil menurut Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sebagai berikut:

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga dibedakan antara pemilik pada satu pihak lain dalam undang-undang ini disebut berdasarkan perjanjian di mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.³

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa, bagi hasil dimaksudkan adalah mempekerjakan tanah miliknya, baik berupa sawah atau kebun kepada orang lain untuk digarap dan dipelihara, sehingga mendatangkan hasil maka hasilnya itu dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Faktor-faktor penyebab timbulnya persawahan dengan sistem bagi hasil di Desa Julubori

Sebelum penulis membahas faktor-faktor penyebab timbulnya bagi hasil di Desa Julubori, maka terlebih dahulu di kemukakan sejarah timbulnya bagi hasil dari tanah perkebunan.

a. Sejarah timbulnya persawahan dengan sistem bagi hasil di Desa Julubori

² A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil Hindia Belanda*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 1

³ A.P Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil*, (Suatu Study Komparatif), Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 49

Desa Julubori adalah suatu daerah yang terkenal karena mempunyai tanah yang subur di samping letak geografisnya sangat strategis, sehingga banyak dikunjungi oleh orang-orang dari Daerah lain.

Pada dasarnya masyarakat Desa Julubori adalah masyarakat primitive/tradisional yang dahulu masyarakatnya menggarap tanahnya dengan memakai tangannya sendiri, adapun alat-alat yang umumnya dipergunakan di antaranya cangkul, pacul, parang dan sebagainya. Sampai akhirnya masyarakat di sana mengikat sedikit demi sedikit, masyarakatnya sudah mulai beternak yang mana hasil ternaknya bisa dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah/ladangnya seperti kerbau, sapi, kuda dan lain-lain.

Olehnya itu binatang ternak yang dipelihara akan dijual bila keperluan yang mendesak bahkan hewan peliharaannya bisa dijadikan jaminan dalam utang-piutang.⁴

Masyarakat Desa Julubori di kala itu, bila musim hujan maka orang-orang beramai-ramai turun bersawah/ladang untuk digarap/di bajak kemudian ditanami, padi, jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Akan tetapi bila musim kemarau datang, maka penduduk Desa Julubori hanya tinggal di rumah menanti musim hujan turun untuk turun ke sawah lagi, begitu keadaan masyarakat atau penduduk dari tahun ke tahun.

⁴ Rola, Tokoh Masyarakat di Dusun Borong Jambu Desa Julubori, "Wawancara" Tanggal 5 Desember 2012.

Hingga pada suatu saat penduduk dari luar yang mengetahui tentang kelebihan Rambutan dibanding dengan tanaman yang ditanam masyarakat setempat dan diperlihatkan bibitnya. Akibatnya masyarakat setempat beramai-ramai memesan bibit Rambutan untuk ditanam di tanahnya masing-masing secara serentak, sampai Desa Julubori Cukup dikenal dengan perkebunan Rambutan-nya. Dan setelah perkebunan Rambutan berkembang dan berhasil maka timbul beberapa inisiatif bagi orang yang punya banyak perkebunan Rambutan yang sudah berbuah akan tetapi dia tidak mampu mengelola tanah perkebunannya sendiri. Di lain pihak ada orang yang mampu menggarap tanah perkebunan akan tetapi dia tidak mempunyai tanah. Maka orang yang tidak mampu menggarap tanah perkebunannya, mereka menawarkan kepada orang yang mampu menggarap tanah perkebunan-nya tersebut.⁵

Itulah sejarah singkat perkebunan bagi hasil di Desa Julubori dan untuk mengetahui faktor timbulnya perkebunan dengan sistem bagi hasil akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

b. Faktor timbulnya perkebunan dengan sistem bagi hasil di Desa Julubori

Sebagaimana yang diungkapkan oleh sekretaris Desa Julubori bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sistem bagi hasil di Desa Julubori adalah:

a) Bagi pemilik Tanah

⁵ Bate, Tokoh Masyarakat Desa Julubori, "Wawancara", Tunggal 5 Desember 2012

- 1) Dalam masyarakat Desa Julubori, jumlah penduduk yang mempunyai lahan, tetapi tidak punya keahlian untuk menggarapnya berjumlah 95 orang.
 - 2) Ada juga masyarakat yang punya kemampuan dan keahlian dalam rnengelola tanahya, tetapi mereka tidak punya kesempatan yang cukup untuk menggarap tanahya tersebut berjumlah 85 orang.
- b) Bagi Penggarap
- 1) Tidak mempunyai lahan garapan, untuk dikelola dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menghidupi diri dan keluarganya 80 orang.
 - 2) Mereka (penggarap) berkelebihan waktu dalam bekerja karena tanah miliknya sedikit sehingga tidak cukup sebagai sumber kehidupan keluarganya 75 orang.
 - 3) Adanya desakan ekonomi yang sedikit semakin banyak sehingga membutuhkan tambahan biaya yang tidak sedikit 73 orang.

Bentuk Perjanjian Penggarapan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Menurut Adat Di Desa Julubori Serta Hak Dan Kewajiban Pemilik Sawah Dan Penggarap Menurut Adat Desa Julubori

1. Bentuk perjanjian Penggarapan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Menurut Adat di Desa Julubori

Dalam bentuk perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil menurut hukum adat Desa Julubori adalah sebagai berikut:

a. Bentuk perjanjian bagi hasil

Telah dikemukakan oleh Ansar selaku kepala Desa Julubori bahwa bentuk perjanjian bagi hasil atas tanah perkebunan dibuat oleh pemilik tanah bersama dengan penggarapnya baik secara tertulis maupun secara lisan dengan perjanjian kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai perjanjian bagi hasil atas tanah perkebunan tersebut dibuat untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari, seperti masa waktu perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban masing-masing, hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dan lain-lain.

Seiring dengan hal tersebut di atas, seorang tokoh agama di Desa Julubori mengemukakan bahwa jika pemilik tanah ingin mengadakan perjanjian penggarapan tanah perkebunan dengan sistem bagi hasil, terlebih dahulu pemilik tanah dan penggarapannya membuat surat/akte perjanjian yang disepakati. Di dalam surat/akte perjanjian tersebut dicantumkan dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa yang bertujuan agar tidak menimbulkan

hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, terutama bagi pemilik tanah dengan penggarapnya masih asing/bukan anggota keluarga (famili) seperti tanah yang tidak dikenal.⁶

Dari uraian kedua tokoh masyarakat tersebut di atas dapat dipahami bahwa tujuan utama dibuatkan surat/akte perjanjian adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan menghindari terjadinya penghianatan terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian perjanjian tertulis tersebut merupakan bukti yang kuat dimata hukum, dengan tujuan agar tidak menimbulkan perselisihan karena kurang memahami akan hak dan kewajiban kedua belah pihak, akan tetapi bagi hasil yang dilakukan di Desa Julubori antara pemilik dan penggarap dilakukan secara lisan saja karena adanya pengaruh yang masih kuat dan aturan hukum adat daerah tersebut.

b. Jangka waktu perjanjian

Telah dikemukakan oleh Dg. Rate selaku tokoh masyarakat bahwa ketentuan lain dalam surat akte perjanjian Bagi hasil terhadap penggarapan tanah perkebunan tidak dicantumkan jangka waktu penggarapannya dalam surat/akte perjanjian akan tetapi yang dicantumkan bahwa bila penggarap tanah perkebunan sudah tidak mampu lagi menggarap tanah perkebunan tersebut akan dengan sendirinya surat/akte perjanjian penggarapan tanah

⁶ Syahril.Tokoh Agama di Dusun Bontobila Desa Rante Baru, "Wawancara", Tunggal 29 November 2012

dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak batal demi hukumnya.⁷

Seiring dengan hal tersebut, bahwa panjang pendeknya waktu perjanjian penggarapan sawah/tanah dengan sistem bagi hasil tergantung dari kesepakatan antara pemilik sawah/tanah dan penggarapan tanah/sawah tergantung dari redaksi surat/akte perjanjian yang dicantumkan bahwa bila kemudian hari penggarapan secara nyata tidak mengurus perkebunan/sawah yang telah diserahkan kepadanya dengan baik, karena faktor kemalasan, maka pemilik tanah harus memberikan motivasi/dorongan kepada penggarap agar bekerja dengan baik, kalau masih juga bermalas-malasan maka pemilik tanah bisa mencabut surat/akte perjanjian tersebut dan demi hukum, perjanjian itu dinyatakan batal, hal ini harus disampaikan kepada kedua saksi yaitu pemilik sawah dan si penggarap dan diketahui oleh kepala Desa setempat.⁸

Jangka waktu perjanjian tidak ditentukan secara tegas batas maksimum dan minimumnya. Hal ini disebabkan perjanjian bagi hasil di Desa Julubori tersebut dilaksanakan dengan adanya kata sepakat raja sebagaimana telah dikemukakan oleh sekretaris Desa Julubori selaku pemilik sawah. "Batas waktu yang diberikan kepada penggarap tidak ditentukan, tergantung

⁷ Rola, Tokoh Masyarakat Dusun Borong Jambu Desa Julubori, "Wawancara", Tanggal 7 Desember 2012

⁸ Hasil, "Wawancara", Tanggal 7 Desember 2012

kemampuan penggarap pengelolanya atau pemilik sawah ingin mengelolanya sendiri dan disetujui oleh kedua belah pihak.⁹

Adapun mengenai sistem bagi hasil menurut hukum ada di Desa Julubori adalah umumnya 1: 2 bagian, di mana pemilik tanah mendapat satu bagian dengan ketentuan bibit, obat-obatan di tanggung oleh penggarapnya mendapat dua bagian dengan ketentuan bibit, obat-obatan di tanggung oleh penggarap. Terkadang pemilik tanah mendapat dua bagian, sedang penggarap mendapat 1 bagian. dengan ketentuan bibit obat-obatan ditanggung oleh pemilik tanah.¹⁰

2. Hak dan Kewajiban Pemilik Sawah Penggarap Menurut Adat Desa Julubori

a. Hak dan Kewajiban Pemilik Sawah

Pemilik tanah dalam perjanjian hasil berhak memperoleh bagian dari hasil sawahnya pada saat dilakukan panen sesuai dengan ini perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebagian dalam hal ini berarti sepertiga bagian di mana satu bagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk penggarap dengan ketentuan yang menyediakan seluruhnya termasuk bibit, pupuk, dan obat-obatan ditanggung oleh penggarap.

Di samping itu pemilik tanah pula untuk memperoleh tanahnya kecuali dari penggarap dalam keadaan baik. Jika perjanjian bagi hasil sudah

⁹ *ibid*

¹⁰ Hasil, "Wawancara" Tanggal 14 Desember 2012

dilanjutkan lagi oleh penggarap karena salah satu pihak mereka dirugikan atau karena sebab-sebab lain.¹¹

Salain dari hak pemilik di atas, maka pemilik mempunyai beban kewajibannya yang harus dilaksanakan, yaitu kewajiban membayar pajak tanah yang bersangkutan. Kewajiban itu tegas dinyatakan dalam pasal 9 Undang-undang No. 2 Tahun 1960, di mana pasal ini memberikan

kewajiban kepada pemilik untuk membayar tanah yang bersangkutan dan melarangnya apabila penggarap adalah pemiliknya sendiri. Jadi secara formal kewajiban membayar pajak pada ada pada pemilik tanah, hal ini disebabkan dengan ketentuan yang berlaku sekarang.

b. Hak dan Kewajiban Penggarap

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarapnya selain meletakkan hak dan kewajiban pemilik tanah juga meletakkan hak dan kewajiban penggarap.

Adapun yang menjadikan dari penggarap dalam hal perjanjian bagi hasil tersebut dalam memperoleh sebagian dari tanah garapnya sebagai imbalan jasanya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Selain hak dari penggarap sebagaimana yang diuraikan di atas, maka terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggarap. Pada prakteknya di Desa Julubori penggarap tanah persawahan Berkewajiban memelihara/mengerjakan tanah persawahan tersebut dengan baik dan teratur

¹¹ *Ibid*

sebagaimana seorang pemilik sendiri. Bila penggarap sudah tidak mampu mengerjakannya tanah tersebut secara baik dan teratur, maka penggarap berkewajiban mengembalikannya kepada pemilik tanah sesuai yang ditekaskau dalam pasal 10 Undang-undang No. 2 1960.¹² akan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanah secara baik seperti ia mendapatkan sebelumnya.¹³

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa penggarap berkewajiban mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik. Pengertian dalam keadaan baik tidak dapat dijelaskan secara tegas, tetapi dapatlah dikatakan bahwa penggarap mengembalikan tanah pemilik dalam keadaan tidak merugikan pemilik tanah, tergantung dari keadaan dan ukuran setempat.



¹² Sekretariat Negara RI, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: 1960), h. 8

¹³ Hasil "Wawancara" dengan Tutu , Petani Penggarap Sawah, Tanggal 19 Desember 2012 di Desa Julubori

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mengemukakan secara panjang lebar sekitar tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah menurut hukum adat Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, bab demi bab maka sebagai uraian penutup yang di dalamnya dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai inti sari dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Di samping itu dalam kegiatan ini juga akan dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan para pembaca.

A. Kesimpulan

1. Sistem pelaksanaan bagi hasil di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang dikenal dengan istilah *Bageanna* dimana seorang pemilik lahan pekebunan menyerahkan lahan tersebut kepada penggarap untuk diolahnya dengan ketentuan bibit-bibit, obat-obatan ditanggung oleh penggarap.
2. Usaha penggarapan bagi hasil sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, baik dari segi pelaksanaannya maupun sistem pembagiannya tidaklah bertentangan dengan ajaran islam maupun undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dan juga telah dikenal dalam ajaran islam dengan istilah

muzara'ah dan juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya.

B. Saran

1. Sistem persawahan bagi hasil yang telah dipraktekkan pada masyarakat Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, diharapkan agar terus dipertahankan, sehingga benar-benar dapat menjadi wadah untuk dapat saling tolong menolong dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani yang berada di daerah ini.
2. Bagi masyarakat petani kebun yang memiliki areal persawahan yang luas, sehingga mereka tidak sanggup mengolahnya secara keseluruhan, diharapkan agar kiranya mereka yang memiliki lahan kiranya senantiasa membantu petani kebun yang tidak memiliki areal perkebunan dapat memberikan sebahagian tanahnya untuk kemudian digarap dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak.
3. Dan diharapkan pula agar sistem bagi hasil yang dilaksanakan di daerah ini benar-benar sesuai dengan konsep bagi hasil yang telah dianjurkan oleh syariat islam dan undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sehingga unsur-unsur penganiyayaan yang mungkin terjadi antara pemilik tanah dan penggarap dapat dihindari. Dengan harapan tersebut maka perjanjian yang telah disepakati bersama benar-benar menjadi patokan dalam pembagian hasil persawahan.

4. Juga kami menyarankan kepada petani kebun di Desa Julubori kiranya senantiasa menghidupkan atau menerapkan sistem penggarapan sawah dengan bagi hasil, sehingga satu pihak dapat memberikan lowongan atau kesempatan kerja kepada para petani kebun yang tidak memiliki dalam meningkatkan produksi dari lahan perkebunan tersebut, sehingga keduanya dapat saling tolong-menolong dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Al-Jasiri, Abdul Rahman, *Al-Fiqhul Alaa Mazahibil Arba'ah*, Juz III, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, Semarang, As-Syifah, 1994.

Al-Asqlani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jilid III, Cet. IV, diterjemahkan oleh Hassan, Bandung, CV. Diponegoro, 1984.

Ahmad, Idris, *Fiqhu Syafi'I*, Juz I, Jakarta: Wilayah, 1999.

As-Siddiqy, *Al-Islam*, Jilid III, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.

A-Turmuzy, *Sunan At-Turmuzy*, Juz II, t.p. 209

Arief, S, *UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hukum Agraria, Hukum Tanah*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.th.

Direpartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: PT. Bumi, 1974.

Dewi Gemala, SH, L.L. Met. Al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Ibnu Majah, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Al-Babil Halabi wa Syurakat.

Kellaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqhi*, t.t.p., At-Taba'atuh wa an-Nusyur wa at-Tauzi, 1987.

Koetjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Perlindungan AP., *Undang-Undang Bagi Hasil*, (Suatu Studi Komparatif, Bandung: Mandar Maju, 1991).

Rahman, Afsalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Soheltema, A.M.P.A., *Bagi Hasil Hindia Belanda*, Jakarta: Bandung Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, Jilid 12, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Simongkir, at, Al-, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1993.

